

**STRATEGI SMART GOVERNANCE MELALUI COMMUNITY-BASED
TOURISM DI DESA BATU BELUBANG**

**SMART GOVERNANCE STRATEGY THROUGH COMMUNITY-BASED
TOURISM IN BATU BELUBANG VILLAGE**

Akbar Farid¹⁾, Muhammad Yogie Adha²⁾, Tri Indrayati³⁾, Ari Agung Nugroho⁴⁾

^{1,2,3,4}Universitas Bangka Belitung, Indonesia

¹Email: akbarfarid664@gmail.com

Naskah diterima tanggal 22-12-2025, disetujui tanggal 26-03-2026 dipublikasikan tanggal 02-06-2026

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat tata kelola pariwisata Desa Batu Belubang yang selama ini menghadapi ketergantungan pada satu destinasi, ketidaksinkronan peran antaraktor, serta lemahnya kapasitas kelembagaan lokal dalam mengembangkan atraksi wisata berbasis komunitas. Tujuan utama program ini adalah membangun model penguatan tata kelola pariwisata berbasis CBT (*Community-Based Tourism*) melalui pemetaan masalah, fasilitasi dialog multipihak, dan penyusunan kesepakatan bersama. Prosedur kegiatan mencakup pengumpulan data melalui wawancara dengan Pemerintah Desa, BUMDes, Pokdarwis, serta observasi dan analisis dokumen, yang dipadukan dengan metode analisis SWOT, Segitiga Konflik Galtung, dan kerangka *Smart Governance*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas komunitas dalam memahami peran strategisnya, munculnya kesadaran akan diversifikasi atraksi, terbentuknya 10 poin kesepakatan antaraktor desa, serta perbaikan koordinasi antara Pemdes, BUMDes, Pokdarwis, dan dinas terkait. Dampak awal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu mengurangi ketegangan struktural, memperjelas kewenangan, dan memperkuat kolaborasi lokal. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa integrasi CBT, analisis konflik, dan *Smart Governance* memberikan kontribusi signifikan bagi transformasi tata kelola pariwisata, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan paket wisata terpadu dan pembentukan regulasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Community-based tourism* (CBT); tata kelola pariwisata; *smart governance*; konflik sosial komunitas; desa wisata batu belubang

Abstract: *This community service activity was carried out to strengthen tourism management in Batu Belubang Village, which has been facing dependence on a single destination, a lack of coordination between actors, and weak local institutional capacity in developing Community-Based Tourism attractions. The main objective of this program is to develop a model for strengthening CBT (Community-Based Tourism) tourism governance through problem mapping, facilitating multi-stakeholder dialogue, and developing a common understanding. The activity procedures included data collection through interviews with the village government, BUMDes, Pokdarwis, as well as observation and document analysis, combined with SWOT analysis, Galtung's Conflict Triangle, and the Smart Governance framework. The results of the activities show an increase in the*

community's capacity to understand its strategic role, the emergence of awareness of attraction diversification, the formation of 10 points of mutual understanding between village actors, and improved coordination between the village government, BUMDes, Pokdarwis, and related agencies. These initial impacts show that a participatory approach can reduce structural tensions, clarify authority, and strengthen local collaboration. The main conclusion shows that the integration of CBT, conflict analysis, and Smart Governance contributes significantly to the transformation of tourism governance, while also opening up opportunities for the development of integrated tourism packages and the establishment of sustainable institutional regulations.

Keywords: *Community-based tourism (CBT); tourism governance; smart governance; community social conflict; batu belubang tourism village*

PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis komunitas telah lama diakui sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menempatkan warga sebagai pengambil keputusan utama dalam pengembangan destinasi (Suansri, 2003). Pendekatan ini mampu menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil dan memperkuat kohesi sosial (Purmada et al., 2016). Desa Batu Belubang memiliki potensi wisata yang besar, baik alam maupun budaya, namun Pemerintah Desa menegaskan bahwa “desa memiliki kekuatan budaya dan alam, tetapi belum memiliki sistem pengelolaan yang mapan,” sehingga menimbulkan urgensi perlunya tata kelola wisata yang lebih terarah (Pemdes Batubelubang, 2025). Di sinilah program pengabdian menjadi penting karena pengelolaan wisata yang tidak terstruktur dapat menghambat dampak ekonomi dan sosial desa.

Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan utama pengembangan desa wisata terletak pada ketidakjelasan peran antar aktor, yang memicu tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi (Syuhada & Dewanti, 2020). Kondisi ini tampak di Desa Batu Belubang, misalnya ketika Kepala Desa menyatakan bahwa “pengelolaan Pantai Tapak Antu merupakan kewenangan pemerintah daerah,” sehingga posisi Pokdarwis menjadi tidak stabil sebagaimana dijelaskan Wiwin (2018) tentang inkonsistensi kelembagaan desa wisata. Ketua BUMDes juga menegaskan bahwa “tidak ada kesepakatan formal dengan Pokdarwis,” menggambarkan relasi antar aktor yang tidak sinkron (BUMDes Batubelubang,

2025). Situasi semacam ini telah diidentifikasi oleh Febriandhika & Kurniawan (2019) sebagai penyebab rendahnya efektivitas manajemen wisata di banyak desa.

Aspek sumber daya manusia turut memperkuat alasan pentingnya pengabdian kepada masyarakat ini, karena kualitas tata kelola tidak terlepas dari kapasitas komunitas (Adiatma et al., 2013). Ketua Pokdarwis menegaskan bahwa “anggota sering berganti dan tidak semua memiliki komitmen jangka panjang,” selaras dengan studi yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung beralih ke pekerjaan berpendapatan cepat ketika wisata belum menghasilkan (Syuhada & Dewanti, 2020). Potensi budaya desa juga belum terkelola secara strategis, sebagaimana Kadus menyampaikan bahwa “tradisi Melayu, Bugis, dan Tionghoa belum disatukan dalam bentuk paket wisata,” yang merupakan masalah umum dalam pengembangan narasi budaya destinasi (Ahsani et al., 2018). Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan kesenjangan antara potensi dan kapasitas, sehingga penting dalam memberikan model tata kelola yang lebih sistematis melalui integrasi CBT dan *Smart Governance*.

Dari sisi kontribusi akademik, pengabdian kepada masyarakat ini memperkuat literatur tentang tata kelola desa wisata dengan menekankan integrasi antara pemberdayaan komunitas dan reformasi kelembagaan, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian terbaru tentang *governance* pariwisata (Farid et al., 2022; Trihayuningtyas et al., 2022). Pemerintah Desa juga menegaskan bahwa “desa membutuhkan pola kerja sama baru antara Pokdarwis dan BUMDes,” sehingga pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya menawarkan analisis, tetapi juga menghasilkan praktik kolaboratif melalui forum audiensi, sosialisasi, sarasehan, dan *workshop* (Pemdes Batubelubang, 2025). Dengan demikian, PkM ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan model tata kelola pariwisata desa yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan tuntutan perkembangan selanjutnya (ASEAN, 2016).

METODE

Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari analisis dokumen perencanaan desa untuk memahami konteks kelembagaan, kemudian dilanjutkan dengan

observasi lapangan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan destinasi wisata. Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama digunakan untuk menjaring informasi mengenai persepsi, kepentingan, serta dinamika sosial yang memengaruhi tata kelola wisata. Sarasehan desa kemudian dilakukan untuk memvalidasi temuan awal dan mengidentifikasi prioritas perbaikan secara partisipatif. Setelah itu, audiensi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dilakukan untuk memastikan sinkronisasi rekomendasi dengan kebijakan daerah serta membuka peluang dukungan lintas lembaga.

Pada tahap akhir, empat kerangka analisis – *SWOT*, Segitiga Konflik Galtung, CBT, dan *Smart Governance* – digabungkan untuk menyusun rekomendasi tata kelola pariwisata yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Pertama, Analisis *SWOT* digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi pengembangan pariwisata Desa Batu Belubang. Data *SWOT* dihimpun melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumen perencanaan desa, lalu dianalisis untuk menghasilkan strategi berbasis komunitas sebagaimana direkomendasikan dalam literatur CBT (Ahsani et al., 2018; Purmada et al., 2016). Kedua, Penggunaan Segitiga Konflik Galtung memberikan kerangka analitis yang memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai akar persoalan tata kelola, sebagaimana nilai yang ditekankan dalam teori perdamaian dan konflik (Galtung, 1969; Kriesberg, 2007). Ketiga, Pendekatan CBT digunakan sebagai dasar untuk merancang model penguatan tata kelola pariwisata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. CBT menekankan keterlibatan komunitas secara aktif dalam pengambilan keputusan, pemerataan manfaat ekonomi, dan penguatan kapasitas organisasi lokal seperti Pokdarwis (Suansri, 2003; Dangi & Jamal, 2016; Purmada et al., 2016; Febriandhika & Kurniawan, 2019). Keempat, Konsep *Smart Governance* digunakan untuk merancang tata kelola pariwisata yang kolaboratif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika lokal. *Smart Governance* menekankan pentingnya koordinasi lintas aktor, keterbukaan informasi, dan pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pariwisata dapat meningkatkan efektivitas organisasi desa wisata serta mengurangi

potensi konflik antar pemangku kepentingan (Wijaya et al., 2023; Susanti & Widiyanti, 2023). Dalam pengabdian ini, *Smart Governance* digunakan untuk menyusun rekomendasi kelembagaan yang memastikan setiap aktor memiliki peran, mandat, dan mekanisme koordinasi yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil utama kegiatan pengabdian yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pariwisata Desa Batu Belubang melalui analisis SWOT, Segitiga Konflik Galtung, prinsip *Community-Based Tourism* (CBT), dan konsep *Smart Governance*. Temuan-temuan ini diperoleh melalui observasi lapangan, analisis dokumen kelembagaan, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, serta sarasehan desa yang melibatkan berbagai aktor kunci. Berikut penjelasannya:

1. Kondisi Awal Pengelolaan Pariwisata Desa Batu Belubang

Pengelolaan pariwisata di Desa Batu Belubang pada tahap awal masih terfokus pada Pantai Tapak Antu sehingga potensi budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif belum dimanfaatkan secara proporsional. Narasumber Disbudparpora mengingatkan bahwa orientasi pembangunan harus mencakup desa secara utuh agar kapasitas destinasi dapat berkembang lebih merata (Notulensi Sarasehan Tapak Antu, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara potensi desa dan praktik pengelolaan yang masih bertumpu pada satu titik atraksi.

Kelemahan tata kelola terlihat dari tidak adanya struktur kewenangan yang jelas antara Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pokdarwis, terutama karena belum tersusunnya PKS sebagai dasar koordinasi resmi. Notulensi menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran ini mencerminkan *contradiction* dalam Segitiga Konflik Galtung, di mana ketidakaturan struktur memunculkan potensi gesekan antaraktor (Notulensi Sarasehan Tapak Antu, 2025). Situasi tersebut diperburuk oleh kapasitas Pokdarwis yang belum stabil, padahal mereka diharapkan menjadi motor pencipta atraksi sebagaimana ditekankan narasumber dan prinsip CBT tentang kendali komunitas (Suansri, 2003).

Relasi antaraktor juga menghadapi hambatan psikologis berupa sikap saling curiga terhadap kelompok yang dianggap ingin mendominasi wisata, sementara perilaku organisasi berjalan tanpa koordinasi yang solid. Praktisi pariwisata mendorong pendekatan inklusif dengan melibatkan seluruh kelompok secara resmi untuk menjaga kohesi sosial dan memperkuat kerja kolaboratif (Notulensi Sarasehan Tapak Antu, 2025). Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa prinsip *Smart Governance* belum diterapkan secara menyeluruh karena belum tersedia SOP wisata, mekanisme informasi, dan kerangka koordinasi yang mampu menyatukan arah pembangunan destinasi.

2. Analisis Konflik Antaraktor Menggunakan Segitiga Konflik Galtung

Analisis konflik dalam pengelolaan pariwisata Desa Batu Belubang menunjukkan adanya ketidaksinkronan kepentingan, persepsi, dan perilaku antaraktor yang menghambat efektivitas tata kelola destinasi. Kekhawatiran peserta mengenai “geng atau kelompok tertentu yang ingin mengambil wisata” mencerminkan *attitudes* negatif yang terbentuk dari pengalaman masa lalu serta ketiadaan struktur pengelolaan yang tegas (Notulensi Sarasehan Tapak Antu, 2025). Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik laten berkembang karena absennya mekanisme yang mampu menata relasi antarpihak secara setara.

Pada dimensi *behavior*, konflik tampak melalui tindakan organisasi yang berjalan tanpa koordinasi antara Pemdes, BUMDes, dan Pokdarwis. Narasumber menegaskan bahwa “pengelolaan wisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tetapi temuan lapangan menunjukkan bahwa SOP, unit usaha pariwisata, dan alur kerja kolaboratif belum tersedia sebagai fondasi operasional (Notulensi Sarasehan Tapak Antu, 2025). Ketidakteraturan ini diperkuat oleh dimensi *contradiction*, terutama karena dualitas kewenangan antara aset wisata milik Pemda dan harapan agar Pokdarwis menciptakan atraksi, yang menandai inti kontradiksi dalam Segitiga Galtung.

Sintesis ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bahwa *attitudes* yang penuh kecurigaan, *behavior* yang tidak terkoordinasi, dan *contradictions* yang belum ditata ulang menghambat penerapan CBT yang membutuhkan kohesi

komunitas dan pengambilan keputusan bersama. Prinsip *Smart Governance* menawarkan kerangka penyelesaian melalui transparansi dan dialog, sebagaimana tercermin dalam 10 poin kesepakatan yang muncul dari forum sarasehan. Upaya ini memperlihatkan potensi transformasi relasi sosial menuju tata kelola yang lebih solid, sehingga pendekatan CBT dapat diterapkan secara lebih efektif pada tahap selanjutnya.

3. Penguatan Tata Kelola Berbasis CBT

Pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) digunakan sebagai kerangka utama penguatan tata kelola wisata Desa Batu Belubang karena menempatkan masyarakat sebagai pengendali atraksi dan pengambil keputusan. Pilihan ini sejalan dengan hasil analisis konflik yang menunjukkan adanya ketimpangan kewenangan antaraktor, terutama ketika narasumber menegaskan bahwa “Pokdarwis adalah aktor utama pengembangan atraksi—bukan menunggu dana pemerintah” (Notulensi Sarasehan Tapak Antu, 2025). CBT menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu merespons kontradiksi struktural sekaligus memulihkan posisi komunitas sebagai motor destinasi.

Penerapan CBT dilakukan melalui fasilitasi, pemetaan isu, pelatihan organisasi, dan perumusan kesepakatan multipihak yang memperkuat pilar *empowerment, participation, dan collective decision-making*. Proses deliberatif dalam perumusan poin kesepakatan memastikan bahwa aktor desa memahami arah pengembangan, termasuk komitmen terhadap tujuan kesejahteraan masyarakat. Wawancara menunjukkan bahwa Pokdarwis masih menghadapi hambatan seperti kepengurusan yang belum stabil dan ketiadaan SOP, sehingga penguatan kapasitas organisasi menjadi langkah mendasar dalam implementasi CBT.

Prinsip CBT diterjemahkan ke dalam tindakan inklusif melalui pelibatan seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya dianggap mendominasi ruang wisata. Saran praktisi bahwa kelompok tersebut perlu dilibatkan secara resmi memperlihatkan nilai rekonsiliatif CBT, diperkuat dengan penegasan narasumber bahwa “nilai wisata terletak pada narasi, budaya, dan

pengalaman – bukan hanya bangunan.” Perubahan pola komunikasi ini membantu meredakan potensi konflik, sementara struktur kolaboratif antara Pemdes, BUMDes, dan Pokdarwis diperjelas agar peran masing-masing dapat berjalan lebih harmonis. Integrasi ini memberi fondasi awal bagi tata kelola pariwisata yang lebih inklusif dan responsif, sekaligus membuka ruang untuk penerapan *Smart Governance* pada tahap berikutnya.

4. Penerapan Prinsip *Smart Governance* dalam Tata Kelola Wisata

Penerapan *Smart Governance* di Desa Batu Belubang difokuskan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan membangun proses pengambilan keputusan yang lebih transparan serta kolaboratif. Pendekatan ini menjadi pelengkap CBT karena menjawab persoalan struktural yang muncul akibat lemahnya kewenangan dan komunikasi antaraktor. Sarasehan kemudian berfungsi sebagai arena *collaborative governance* yang menghasilkan 10 poin kesepakatan, termasuk penegasan perlunya harmoni antara Pemdes, BUMDes, dan Pokdarwis sebagai fondasi tata kelola destinasi yang lebih konsisten (Notulensi Sarasehan Tapak Antu, 2025).

Prinsip *Smart Governance* tampak melalui identifikasi masalah teknis, pembukaan koordinasi lintas sektor, dan fasilitasi penyusunan PKS untuk menata ulang kewenangan antaraktor desa. Narasumber dinas menjelaskan bahwa dukungan infrastruktur seperti KWh dan PBG/GPA telah diusulkan, sehingga pengabdian membantu Pemdes menyampaikan kebutuhan secara sistematis. Upaya ini memperlihatkan fungsi *Smart Governance* sebagai kerangka penyelesaian konflik kelembagaan melalui kejelasan peran, aturan bersama, serta mekanisme komunikasi formal yang lebih teratur. Nilai inklusivitas juga menguat ketika peserta menerima pendekatan rekonsiliatif seperti melibatkan kelompok yang sebelumnya dianggap mendominasi ruang wisata.

Integrasi *Smart Governance* dan CBT menghasilkan perubahan nyata pada kapasitas organisasi dan relasi sosial desa. Pokdarwis menjadi lebih percaya diri setelah kesepakatan bahwa mereka berhak mengembangkan atraksi meski lahan pantai dimiliki Pemda, sementara BUMDes memahami perannya sebagai entitas

usaha pariwisata yang mendukung inovasi komunitas. Pada saat yang sama, persepsi masyarakat bergeser dari orientasi mono-destinasi menuju pengembangan atraksi berbasis budaya dan ekonomi lokal. Perubahan ini menegaskan bahwa tata kelola pariwisata yang efektif memerlukan struktur kolaboratif yang stabil, partisipatif, dan responsif, sehingga menjadi dasar bagi penyusunan tabel masalah–solusi–output pada bagian berikutnya.

5. Tabel Masalah, Solusi, dan Output

Tabel berikut merangkum berbagai masalah utama yang diidentifikasi selama proses pengabdian, solusi yang dirancang melalui pendekatan CBT, *Smart Governance*, serta analisis konflik, dan output yang dihasilkan setelah kegiatan intervensi dilakukan. Penyusunan tabel ini bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai hubungan antara persoalan lapangan, strategi penanganan, dan dampak nyata pada mitra pengabdian. Setiap poin dirumuskan berdasarkan hasil wawancara, notulensi sarasehan, serta observasi lapangan yang terdokumentasi dalam proses fasilitasi. Untuk memahami struktur penyelesaian masalah yang dijalankan, perhatikan Tabel 1.

Tabel 1. Masalah, Solusi, dan Output Penguatan Tata Kelola Pariwisata Desa Batu Belubang

No	Masalah	Solusi (Intervensi Pengabdian)	Output (Perubahan yang Terukur)
1	Pengelolaan wisata berfokus hanya pada Pantai Tapak Antu meskipun desa memiliki potensi budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif. (Notulensi, 2025)	Fasilitasi sarasehan untuk membuka kesadaran akan pentingnya diversifikasi atraksi berbasis CBT; penguatan pemetaan aset budaya dan ekonomi lokal.	Kesepahaman bahwa tujuan desa wisata bukan hanya pantai; muncul ide paket wisata terpadu yang menggabungkan budaya, kuliner, dan edukasi bahari.
2	Tidak ada SOP, PKS, atau struktur kewenangan antar Pemdes–BUMDes–Pokdarwis sehingga sering bekerja sendiri-sendiri. (Makalah Analisis Masalah; Notulensi 2025)	Penerapan <i>Smart Governance</i> melalui forum deliberatif; penyusunan rancangan awal PKS; identifikasi peran dan fungsi setiap lembaga.	Terbentuk 10 poin kesepahaman yang memperjelas pembagian peran; Pemdes, BUMDes, dan Pokdarwis sepakat membangun struktur kerja bersama.
3	Kapasitas Pokdarwis masih lemah dan kepengurusan tidak stabil sehingga perannya tidak maksimal. (Wawancara Pokdarwis, 2025)	Pelatihan organisasi, penguatan peran Pokdarwis melalui CBT, dan fasilitasi diskusi tentang penciptaan atraksi mandiri.	Pokdarwis menyadari posisinya sebagai pencipta atraksi; meningkatnya kepercayaan diri untuk mengembangkan atraksi tanpa bergantung pada APBD.

No	Masalah	Solusi (Intervensi Pengabdian)	Output (Perubahan yang Terukur)
4	Ketegangan sosial muncul akibat keberadaan “kelompok tertentu yang ingin menguasai wisata.” (Notulensi, Sesi I & II)	Resolusi konflik berbasis Segitiga Galtung; pendekatan inklusif (“preman dijadikan teman”); integrasi seluruh kelompok sosial dalam struktur resmi wisata.	Menurunnya sikap eksklusif; penerimaan masyarakat terhadap pelibatan seluruh elemen desa dalam pengelolaan wisata.
5	Minimnya informasi dan koordinasi terkait infrastruktur (listrik, air, lahan pantai). (Notulensi, Sesi II)	Pengaktifan jalur komunikasi Pemdes–Dinas Pariwisata; fasilitasi komunikasi lintas sektor sebagai bagian dari <i>Smart Governance</i> .	Pemdes memahami status lahan, perkembangan usulan pemasangan KWh, dan alur permohonan DAK; komunikasi formal dengan dinas menjadi lebih teratur.
6	Kurangnya inovasi atraksi akibat ketergantungan pada bantuan pemerintah daerah. (Notulensi 2025)	Penguatan kreativitas komunitas melalui diskusi, studi narasi wisata, dan pelatihan penyusunan atraksi berbasis budaya lokal.	Munculnya rencana atraksi berbasis narasi sejarah desa dan edukasi nelayan; masyarakat mulai melihat budaya sebagai aset wisata.

6. Interpretasi Temuan dalam Perspektif CBT, Konflik, dan *Smart Governance*

Transformasi tata kelola pariwisata di Desa Batu Belubang menunjukkan bahwa dinamika sosial, struktur kelembagaan, dan kapasitas komunitas saling memengaruhi arah pengembangan desa wisata. Integrasi analisis Segitiga Konflik Galtung, prinsip CBT, dan *Smart Governance* memperlihatkan bahwa perubahan yang terjadi bukan hanya hasil intervensi teknis, tetapi juga merupakan proses negosiasi sosial antaraktor dengan kepentingan berbeda. Situasi ini menegaskan bahwa tata kelola destinasi selalu melekat pada relasi sosial yang mengiringinya, terutama ketika tumpang tindih kewenangan dan sikap saling curiga menjadi hambatan utama dalam membangun kolaborasi.

Analisis konflik memperlihatkan bahwa ketegangan antaraktor berakar pada ketidakjelasan struktur dan lemahnya komunikasi, bukan sekadar perbedaan kepentingan. Dimensi *attitudes* tampak dari kekhawatiran masyarakat terhadap kelompok tertentu yang dianggap ingin mendominasi wisata, sementara *behavior* tercermin pada tindakan lembaga yang bekerja tanpa koordinasi. Pada dimensi *contradiction*, persoalan muncul dari ketidakjelasan siapa yang berhak mengelola atraksi di lahan milik Pemda, sehingga konflik yang tampak sebenarnya mencerminkan ketidakteraturan struktur sosial yang lebih mendasar.

Penerapan CBT menjadi instrumen penting untuk merespons kerumitan tersebut karena menempatkan komunitas sebagai pusat pengambilan keputusan dalam pengembangan destinasi. Temuan pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki modal sosial kuat, namun belum difasilitasi dalam struktur yang memungkinkan partisipasi efektif. Melalui sarasehan, komunitas merumuskan tujuan kolektif dan memahami bahwa inovasi atraksi tidak harus bergantung pada anggaran pemerintah, sehingga CBT turut memulihkan kepercayaan diri masyarakat sebagai pemilik substantif desa wisata.

Smart Governance melengkapi CBT dengan menyediakan mekanisme tata kelola yang menata ulang hubungan antaraktor melalui transparansi dan kejelasan peran. Terbentuknya 10 poin kesepakatan memperjelas fungsi Pemdes, BUMDes, dan Pokdarwis dalam pengelolaan pariwisata, serta menunjukkan bahwa *governance* adalah praktik sosial yang memungkinkan penyelesaian masalah melalui dialog terbuka. Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan perubahan sikap yang lebih inklusif, misalnya ketika masyarakat menerima pentingnya melibatkan kelompok yang sebelumnya dianggap ancaman dan memaknai relasi sosial sebagai peluang kolaborasi. Perpaduan inilah yang memperkuat fondasi tata kelola pariwisata, meningkatkan kapasitas organisasi, dan menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai potensi desa wisata, sehingga transformasi sosial menjadi prasyarat utama bagi berkembangnya destinasi berbasis komunitas.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Batu Belubang dilaksanakan melalui serangkaian langkah pengumpulan data berupa wawancara, observasi, analisis dokumen, serta fasilitasi sarasehan yang mendukung penerapan metode analisis SWOT, Segitiga Konflik Galtung, pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT), dan prinsip *Smart Governance* untuk menata ulang struktur tata kelola pariwisata desa. Implementasi metode tersebut menghasilkan kontribusi yang terukur, seperti meningkatnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan atraksi berbasis budaya, terbentuknya kesepakatan kelembagaan antara Pemdes, BUMDes, dan Pokdarwis, serta munculnya komitmen kolaboratif

untuk mengembangkan desa wisata secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, hasil kegiatan masih memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain belum selesainya penyusunan SOP dan PKS secara formal, keterbatasan kemampuan teknis Pokdarwis dalam perencanaan atraksi, serta belum optimalnya infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih di kawasan wisata. Berdasarkan batasan tersebut, kegiatan lanjutan perlu diarahkan pada pendampingan intensif penyusunan regulasi tata kelola, pelatihan desain atraksi berbasis narasi budaya, serta penguatan koordinasi desa–dinas untuk percepatan penyediaan sarana prasarana pendukung. Ruang lingkup pekerjaan masa depan meliputi pengembangan paket wisata terpadu, peningkatan kapasitas digital desa wisata, dan evaluasi keberlanjutan tata kelola melalui pemantauan dampak sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Bangka Belitung atas dukungan pendanaan melalui skema Pengabdian Desa Unggulan Tahun Anggaran 2025. Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Desa Batu Belubang, BUMDes Batu Belubang, dan Pokdarwis Tapak Antu atas partisipasi dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan. Terima kasih turut disampaikan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah, para narasumber, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Desa Batu Belubang atas kontribusi dan kerja sama yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatma, I., Bambang, A. N., & Purnaweni, H. (2013). Peralihan mata pencaharian sebagai bentuk adaptasi (Studi kasus: Desa Batu Belubang, Bangka). *Teknik*, 34(2), 123–133. <https://doi.org/10.14710/teknik.v34i2.5637>
- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur mewujudkan kemandirian desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 135–146. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2270>

- ASEAN. (2016). *ASEAN Community Based Tourism Standart*. Jakarta: The ASEAN Secretariat. <https://asean.org/book/asean-community-based-tourism-standard-2/>
- Dangi, T. B., & Jamal, T. (2016). An integrated approach to sustainable community-based tourism. *Sustainability*, 8(5), 475. <https://doi.org/10.3390/su8050475>
- Farid, A., Amri, M., Fahry, M., & Fuad, M. (2022). Strategi governance melalui community-based tourism sebagai upaya penyelesaian konflik wisata di Gua Pindul. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 114–131. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.114-131>
- Febriandhika, I., & Kurniawan, T. (2019). Membingkai konsep pariwisata yang berkelanjutan melalui community-based tourism: Sebuah review literatur. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 50–56. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p50-56>
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Kriesberg, L. (2007). *Constructive conflicts: From escalation to resolution* (3rd ed.). Rowman & Littlefield. <https://doi.org/10.1111/J.1468-0130.2008.00525.X>
- Makalah Singkat Analisis Masalah Desa Batu Belubang. (2025). Dokumen internal PDU UBB.
- Ni'matuzahroh, S., & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: Teori dan aplikasi dalam psikologi*. Malang: UMMPress.
- Notulensi Sarasehan Tapak Antu. (2025). *Forum Diskusi Tata dan Budaya Organisasi dalam Pengelolaan Pariwisata Desa Batu Belubang*. Pengabdian Desa Unggulan UBB, 21 November 2025.
- Purmada, D. K., Wilopo, & Hakim, L. (2016). Pengelolaan desa wisata dalam perspektif community-based tourism (Studi kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 32(2), 15–22.
- Ramsbotham, O., Miall, H., & Woodhouse, T. (2015). *Contemporary conflict resolution*. Polity Press.
- Rochman, N. (2016). Model pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Equilibria Pendidikan*, 1(1). [10.26877/ep.v1i1.1831](https://doi.org/10.26877/ep.v1i1.1831)
- Rohimah, A., Hariyoko, Y., & Ayodya, B. P. (2018). Strategi pengembangan potensi pariwisata melalui pendekatan Community Based Tourism (CBT) di Desa Carang Wulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(4), 363–368. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.04.11>

- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Responsible Ecological Social Tour.
- Susanti, F. E., & Widiyanti, N. (2023). Peran organisasi tata kelola dalam pengelolaan Desa Wisata Lembah Papah Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. *ADARMA*, 10(1), 19-27.
- Syafiqah, K. K., Nurdin, D. A., & Putri, F. M. (2022). Implementasi konsep community-based tourism dalam mendukung pengelolaan pariwisata berkelanjutan pada Destinasi Wisata Sanghyang Kenit di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pecinta Alam dan Lingkungan*, 1(2), 1-18.
- Syuhada, M. R. F., & Dewanti, D. S. (2020). Tourism development strategies on CBT of Pindul Cave, Gunungkidul Regency. *Journal of Economic Research and Social Sciences*, 4(2), 102–117. <https://doi.org/10.18196/jerss.v4i2.10112>
- TOR Pengabdian Desa Unggulan Batu Belubang 2025. (2025). Universitas Bangka Belitung.
- Tribun Bangka. (2024, September 30). Desa Batu Belubang dapat penghargaan LDWN tahun 2024 dari Kemendes PDTT. *Tribun Bangka*. <https://bangka.tribunnews.com/2024/09/30/desa-batu-belubang-dapat-penghargaan-ldwn-tahun-2024-dari-kemendes-pdtt>
- Trihayuningtyas, E., Rahtomo, W., & Darmawan, H. (2018). Rencana tata kelola destinasi pariwisata kawasan Pulau Camba-Cambang dan sekitarnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*, 15(1), 33–47. <https://doi.org/10.17509/jurel.v15i1.11293>
- Wijaya, A. A. M., Sa'ban, L. M. A., & Nastia, N. (2023). Opportunities and challenges of collaborative governance in local government tourism public policy. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 214–234. DOI:10.33509/jan.v29i3.2681
- Wiwin, I. W. (2018). Community based tourism dalam pengembangan pariwisata Bali. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, 3(1), 69–75. <https://doi.org/10.35912/jspp.v2i1.2042>